

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN BANYUWANGI

Yuswan Bahtiar, I Wayan Subagiarta, Lilis Yuliaty
Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

ABSTRACT

This aim of study were to determine the economic development in Banyuwangi views of economic growth; to find the right strategy to increase employment and economic growth in Banyuwangi. This type of research in this study is descriptive. The research was done in Banyuwangi with economic growth considerations are another factor to increase employment so that each has a contribution to improving the economy of Banyuwangi. Data collected in the form of data of economic indicators include GDP, economic growth and the amount of labor. Methods of data analysis using shifi share analysis. The results showed economic growth in Banyuwangi views of economic growth shows that all sectors in Banyuwangi is positive means that all sectors have a competitive advantage in advancing the economy in Banyuwangi. All sectors were marked positive is the fast-growing sector that has the potential to be developed in accelerating the growth of GDP. A sector that has the fastest growth were agriculture, trade and services faster than others. Although other sectors are also potential to develop in Banyuwangi. Strategies to increase employment and economic growth in Banyuwangi, among others, the budget should be prioritized to improve the quality of public services in a more efficient and effective and responsive to the needs and potential of the district of Banyuwangi; reduce the infrastructure gap in both the district level and antarkecamatan. quality sources of economic growth and sustainable; improve productivity and better competitiveness; improving the quality of education with the improvement of infrastructure and services thoroughly good education for formal education, and informal and non-formal education and revitalization of this, production of the agricultural sector will increase, so that its contribution to the GDP will also rise.

Keywords: *economic growth, employment, strengths, weaknesses, opportunities and threats*

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting yang harus ada di dalam pembangunan ekonomi, dimana laju pertumbuhan ekonomi diharapkan harus lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk, dengan demikian peningkatan pendapatan perkapita dapat tercapai. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dengan sendirinya ataupun dengan campur tangan pemerintah harus dapat dinikmati masyarakat. Menurut Samuelson dan Nordhaus (2005), ada empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yaitu (1) sumberdaya alam, (2) sumberdaya manusia, (3) pembentukan modal, dan (4) teknologi. Kekayaan sumberdaya alam sangat membantu perekonomian suatu negara, walaupun belum cukup bila didukung oleh keahlian penduduk untuk mengeksplorasi sumberdaya alam. Pembentukan modal juga merupakan faktor produksi sebagai unsur dominan untuk pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan datang. Ranis dan Stewart (2001) menemukan investasi berpengaruh positif signifikan serta distribusi pendapatan yang lebih baik berhubungan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sedangkan tingkat awal GDP perkapita

berpengaruh negatif signifikan. Yuliarmi (2008) menemukan bahwa variabel yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi :konsumsi RT, investasi dan pengeluaran pemerintah.

Faktor lain yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat dalam pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi. Namun di sisi lain, akibat buruk dari penambahan penduduk yang tidak diimbangi oleh kesempatan kerja akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan.

Tenaga kerja merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah

Salah satu wilayah yang memerlukan pertumbuhan ekonomi adalah Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur sebagian besar bertumpu pada sektor industri yang didukung oleh sektor-sektor industri lainnya. Hal ini ditandai dengan besarnya sumbangan sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur dibandingkan sektor lainnya. Salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi. Hal itu menunjukkan bahwa Banyuwangi juga mengalami perkembangan yang bagus terhadap sektor industri manufaktur di Jawa Timur.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu Pemerintah Daerah tingkat II yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi mulai berdiri sejak 1 Januari 1929 dan telah melalui sejarah yang cukup panjang. Pembangunan infrastruktur yang berupa sarana publik di Kabupaten Banyuwangi sebelum diberlakukannya otonomi daerah telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pemberlakuan otonomi daerah di Kabupaten Banyuwangi baru dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001 sebagai tuntutan dari UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Dengan mengacu pada kajian tersebut maka sejak tahun 2001 Kabupaten Banyuwangi telah memasuki babak baru dalam sistem desentralisasi yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (pemkabBanyuwangi.go.id)

Kondisi perekonomian daerah secara makro di Kabupaten Banyuwangi dijelaskan oleh membaiknya pendapatan perkapita, menurunnya angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Perekonomian Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan IV tahun 2013 masih menunjukkan kinerja yang cukup baik. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV tahun

2012, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan IV tahun 2013 menunjukkan angka 9,84 persen sedangkan pada triwulan IV tahun 2012 menunjukkan 6,74 persen ini berarti bahwa ada kenaikan pertumbuhan ekonomi antara triwulan IV tahun 2012 ke triwulan IV tahun 2013 sebesar 3,10 poin. Kondisi ini menunjukkan besarnya pertumbuhan ekonomi menurut sektor di Kabupaten Banyuwangi yang semuanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif walaupun ada sedikit penurunan di setiap sektornya.

PDRB Kabupaten Banyuwangi mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana terjadi penurunan dari tahun 2009 sampai 2011 kemudian meningkat pada tahun 2015. Selama kurun 5 tahun terakhir yakni mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 besaran PDRB ADHB menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Namun peningkatan ini lebih dipengaruhi oleh peningkatan harga barang dan jasa pada masing-masing kegiatan ekonomi, sehingga diperlukan suatu pengkajian dengan mempertimbangkan besaran PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dalam kurun waktu tersebut.

Berdasarkan data tersebut, nampak bahwa kondisi ekonomi Kabupaten Banyuwangi mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahunnya. Namun ada fenomena yang menarik untuk diteliti

Tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui perkembangan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi dilihat dari pertumbuhan ekonomi;
2. untuk mengetahui strategi yang tepat untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi;

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian untuk menjelaskan fenomena dan menggambarkan suatu objek. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyuwangi dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penunjang meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga masing-masing memiliki kontribusi untuk meningkatkan perekonomian Banyuwangi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data time series (kurun waktu). Data yang dikumpulkan berupa data indikator ekonomi meliputi PDRB, pertumbuhan ekonomi dan jumlah tenaga kerja Disamping itu data-data indikator demografis meliputi data jumlah dan pertumbuhan penduduk, angkatan kerjaya yang diperoleh dari kantor BPS Kabupaten Banyuwangi, dan instansi-instansi terkait lainnya serta studi pustaka selama periode waktu tahun 2002 sampai 2013.

Analisis Shift Share digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Analisis ini dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah, yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional.

Setelah mengetahui strategi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk mempermudah teknik analisis lingkungan eksternal dalam SWOT. Sedangkan analisis lingkungan internal akan memberikan gambaran tentang keunggulan dan kelemahan dari perusahaan. Internal

Factor Evaluation (IFE) digunakan untuk mempermudah teknik analisis lingkungan internal dalam SWOT.

Definisi operasional penelitian dijelaskan sebagai berikut.

1. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan total pendapatan masyarakat yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pertumbuhan yang diukur dengan indikator pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dalam satuan prosentase.
2. PDRB merupakan besarnya total nilai tambah produksi yang dihasilkan dari berbagai sektor yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah tanpa memperhatikan faktor produksi yang dipakai yang dinyatakan dalam bentuk rupiah per tahun.
3. Nilai Tambah Bruto adalah PDRB Kabupaten Banyuwangi yang dihitung atas dasar harga konstan dinyatakan dalam bentuk rupiah.
4. Tenaga Kerja adalah jumlah penduduk usia kerja (berusia 10 tahun ke atas) yang bekerja, dalam hal ini diukur dengan jumlah tenaga kerja dalam satuan orang per kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.

3. Hasil Penelitian

Pengukuran kinerja keuangan daerah total penyerapan tenaga kerja adalah cenderung konstan dengan total penduduk yang bekerja adalah sekitar 800.000 jiwa. Hal ini merefleksikan terdapat periode jobless growth dimana pertumbuhan ekonomi tidak banyak memberikan peningkatan bagi penyerapan tenaga kerjanya. Dilihat dari lapangan usahanya, sektor pertanian masih menjadi sektor yang paling dominan dalam menyerap tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi, dengan sebesar 33,1% dari total penyerapan tenaga kerja pada tahun 2013. Meskipun demikian penyerapannya cenderung menurun dari tahun ke tahun, menandakan banyak tenaga kerja yang beralih dari sektor pertanian ke sektor yang lain. Sektor perdagangan menyerap tenaga kerja kedua terbesar dengan proporsi sebesar 24,3%, dan kemudian dilanjutkan dengan sektor jasa kemasyarakatan dan sektor industri pengolahan.

tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, mayoritas pekerja di Kabupaten Banyuwangi masih didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan yang rendah (SD dan SMP), dengan proporsi lebih dari 50%. Sebaliknya, hanya terdapat proporsi yang kecil untuk pekerja dengan tingkat pendidikan yang tinggi yaitu SMA (17,2%) dan perguruan tinggi (3,21%). Meskipun demikian proporsinya semakin lama semakin meningkat, menunjukkan semakin banyak pekerja di Kabupaten Banyuwangi yang terdidik. Hal ini juga didukung oleh menurunnya jumlah pekerja dengan tingkat pendidikan yang rendah, seperti pekerja dengan pendidikan SD maupun SMP. Penurunan ini didorong terutama oleh investasi pada pendidikan dasar dengan program Wajib Belajar 9 tahunnya. Pekerja terdidik cenderung memiliki kesempatan bekerja di sektor formal, sedangkan pekerja yang kurang terdidik banyak yang bekerja di sektor informal.

Analisis shift share digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan berbagai indikator kegiatan ekonomi, seperti produksi dan kesempatan kerja pada dua titik waktu di suatu wilayah. Dari analisis ini diketahui perkembangan suatu sektor di suatu wilayah jika dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya, apakah pertumbuhannya cepat atau lambat. Dalam analisis ini komponen pertumbuhan

ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu komponen pertumbuhan nasional (PN), komponen pertumbuhan proporsional (PP) dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW).

Komponen pertumbuhan nasional adalah perubahan kesempatan kerja atau produksi suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan kesempatan kerja atau produksi nasional secara umum, perubahan kebijakan ekonomi nasional atau perubahan dalam hal-hal yang mempengaruhi perekonomian semua sektor dan wilayah. Komponen pertumbuhan proporsional tumbuh karena perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan mentah, perbedaan dalam kebijakan industri (misalnya kebijakan perpajakan, subsidi dan price support) dan perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar.

Komponen pertumbuhan pangsa wilayah timbul karena peningkatan atau penurunan PDRB atau kesempatan kerja dalam suatu wilayah dibandingkan wilayah lainnya. Cepat atau lambatnya pertumbuhan suatu wilayah dibandingkan wilayah lainnya ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses ke pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial dan ekonomi serta kebijakan ekonomi regional pada wilayah tersebut.

Matrik SWOT dilakukan dengan berdasarkan pada analisis SWOT. Maka dengan analisis SWOT akan tercipta 4 alternatif strategi yaitu : SO, WO, ST, WT. data alternatif strategi ini dapat diperoleh dari matriks IFAS dan EFAS. Faktor internal dan eksternal yang diperoleh akan menjadi faktor strategis yang diformulasikan dalam bentuk tabel IFAS dan EFAS. Tiap tabel tersebut diberi pembobotan dan rating adalah untuk mengetahui apakah faktor strategis pemerintah dapat memberikan dampak positif atau negatif, dimana dampak positif dapat menjadi faktor kekuatan dan peluang. Pemberian nilai bobot dan Internal dan Eksternal didasarkan pada perhitungan kategori nilai penilaian terhadap setiap faktor strategis pemerintah dimana dalam penelitian menggunakan Statistik Ditribusi Frekuensi, dan dari situlah terlihat indikator mana yang paling memiliki pengaruh besar sampai yang memiliki pengaruh kecil maka disitulah peneliti memberikan penilaian. Fungsi dari pembobotan dan rating adalah untuk mengetahui faktor strategis pemerintah dan dapat memberikan dampak positif dan negatif.

Berdasarkan formulasi IE Matrik, didapatkan gambaran bintang strategi Kabupaten Banyuwangi yaitu pada kuadran IV (Empat) yang bertanda bintang (3.240 : 2.467). Dalam kuadran IV ini, Kabupaten Banyuwangi seharusnya menerapkan strategi stabilitas. Dalam artian strategi yang diterapkan tanpa mengubah arah strategi yang ditetapkan. Untuk langkah selanjutnya, pemerintah dapat menerapkan strategi penguatan perekonomian dan tenaga kerja.

4. Pembahasan

Strategi untuk Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Hasil Analisis SWOT

a. Strategi Berdasarkan Kelemahan

Pembangunan diimplementasikan pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, dan perlindungan anak; menurunnya

kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antar kelompok masyarakat, dan antarkelompok masyarakat. Untuk mencapai tujuan diatas, permasalahan yang dihadapi :

1) Terbatasnya Anggaran Pembangunan Daerah.

APBD Kabupaten Banyuwangi dalam beberapa tahun terakhir jumlahnya diatas Rp. 1 triliun rupiah. Dalam konteks pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi, APBD menduduki posisi yang sangat strategis guna menstimulasi perekonomian di Kabupaten Banyuwangi. APBD Kabupaten Banyuwangi diharapkan mampu menggerakkan peningkatan produksi dan konsumsi masyarakat, menggairahkan perdagangan keluar dan kedalam daerah, serta mendorong investasi melalui peningkatan sarana dan prasarana publik. Dilihat dari jumlahnya, APBD Kabupaten Banyuwangi cukup besar dengan angka melampaui Rp. 1 triliun. Namun jika dilihat dari kontribusinya amatlah kecil dibandingkan total rupiah yang beredar dalam perekonomian daerah. Kontribusi APBD Kabupaten Banyuwangi hanya 5 persen dari Produk Domestik Regional Bruto Banyuwangi yang sebesar Rp. 20 triliun.

Untuk itu harus diimbangi oleh strategi yang tepat sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi. APBD harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara lebih efisien dan efektif serta responsif terhadap kebutuhan dan potensi wilayah Kabupaten Banyuwangi. Harapan besar tersebut bisa dilaksanakan, jika perencanaan anggaran belanja setiap kegiatan pada APBD efisien, tepat sasaran, wajar, tidak underfinancing (kurang) atau overfinancing (berlebih).

APBD Kabupaten Banyuwangi masih ditopang dari sebagian besar Dana Perimbangan. Untuk tantangan yang dihadapi adalah sinkronisasi pembangunan disetiap bidang sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat. Anggaran yang terbatas harus dipastikan bahwa setiap Satuan perangkat Daerah melaksanakan pembangunan di setiap bidang dengan memiliki komitmen yang kuat pada pencapaian sasaran dan visi misi pembangunan daerah. Untuk mencapai sinergi tersebut melalui proses komunikasi, konsultasi, dan koordinasi serta pemangku kepentingan terkait di pusat dan provinsi dengan mengedepankan keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan. Sinergi yang baik antarberbagai pihak tersebut untuk membuka akses jejaring seluruh pihak agar dapat berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.

2) Ketersediaan Infrastruktur yang Terbatas.

Pembangunan infrastruktur mempunyai peran yang sangat strategis untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Revitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur. Walaupun belanja dalam bidang infrastruktur telah cukup besar, namun masih belum cukup untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur baik di tingkat Kabupaten maupun antarkecamatan. Ketujuh, sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan

3) Adanya kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi harus tersebar ke seluruh wilayah, terutama wilayah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Pertumbuhan di seluruh

wilayah perlu memperhatikan keterkaitan terhadap pelaku dan sumber daya lokal sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan, sekaligus nilai tambah yang dinikmati di daerah-daerah. Untuk mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha, pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan, yang banyak menyediakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing yang lebih baik. Harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai jika para pekerja tersebut dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, kemampuan untuk bekerja (employable) dan disiapkan untuk menghadapi persaingan global dalam pasar kerja. Pendidikan saja tidak cukup, karena banyak para pekerja masih belum siap untuk memasuki pasar kerja.

4) Keterbatasan kapasitas dan kualitas birokrasi.

Keberhasilan proses pembangunan tergantung pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi masih perlu ditingkatkan untuk menghadapi meningkatkan kinerja dan citra pelayanan publik. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga saat ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama yang membawa dalam meningkatkan daya saing daerah.

5) Pendidikan dan kesehatan

Pendidikan dan kesehatan adalah dua isu yang paling dominan di dalam memberi sumbangan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Apabila kualitas pendidikan dan kesehatan bagus, maka kualitas SDM juga akan bagus. Oleh karena itu, dua hal ini menjadi bagian penting dalam MDGs sebagaimana diprogramkan oleh PBB. Sehingga, beberapa negara juga menaruh perhatian yang serius terhadap dua isu ini.

Kualitas SDM di Kabupaten Banyuwangi masih menjadi permasalahan yang cukup serius. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyuwangi masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Timur. SDM merupakan faktor utama dalam pembangunan. Negara-negara yang memiliki pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, serta tingkat kesejahteraan yang lebih baik biasanya adalah negara-negara yang memiliki SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, kualitas SDM merupakan salah satu faktor penentu bagi kemampuan suatu negara atau daerah untuk menjadi negara atau daerah yang memiliki daya saing tinggi. Jepang dan sejumlah negara lainnya merupakan negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, namun negara-negara tersebut memiliki SDM yang berkualitas sehingga mereka mampu menjadi negara yang maju. Kualitas SDM yang bagus menjadikan negara maju mampu menjadi negara yang lebih kompetitif (competitive state) apabila dibandingkan dengan negara-negara lain. Negara-negara kompetitif yang terdapat di Asia diantaranya adalah Jepang dan Singapura.

Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM maka masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan harus diatasi. Salah satu contoh di Kabupaten Banyuwangi adalah angka buta huruf yang masih lebih tinggi daripada angka buta huruf Provinsi Jawa Timur. Untuk meningkatkan pembangunan di sektor pendidikan, Kabupaten Banyuwangi dihadapkan pada tantangan untuk mengurangi angka buta huruf dan meningkatkan angka partisipasi kasar. Karena dengan berkurangnya angka buta huruf dan meningkatnya angka partisipasi kasar, maka akan semakin tinggi pendidikan yang terserap pada anak-anak di usia belajar. Selain itu, Kabupaten Banyuwangi juga

dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkatan. Melalui pendidikan yang berkualitas, maka akan tercipta siswa-siswa yang berkualitas dan mempunyai skill yang diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Peningkatan kualitas pendidikan dengan perbaikan sarana prasarana dan pelayanan pendidikan secara menyeluruh baik untuk pendidikan formal, maupun pendidikan informal dan non formal.

6) Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran merupakan isu yang sangat berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Keduanya berkaitan dengan minimnya atau bahkan ketiadaan pendapatan untuk menopang hidup sehari-hari. Kedua isu tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Pengangguran merupakan salah satu penyulut bagi lahirnya dan merebaknya angka kemiskinan. Oleh karena itu, pengangguran merupakan rintangan terbesar bagi upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan juga menjadi salah satu pendorong lahirnya pengangguran. Kemiskinan merupakan penghalang seseorang untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Kurangnya pendidikan yang berkualitas merupakan sumber penting bagi pengangguran. Mengingat seseorang tidak memiliki kualitas SDM yang memadai, dia tidak bisa berkompetisi ketika harus bersaing di pasar kerja.

Masalah kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Banyuwangi, masih cukup mendominasi. Angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi memang mengalami penurunan di beberapa tahun terakhir. Tetapi, jumlah penduduk dalam kategori sangat miskin dan miskin masih cukup besar. Tahun 2014, angka pengangguran terbuka di Banyuwangi mengalami penurunan menjadi 4,1%. Sedangkan di Jawa Timur naik menjadi 5,1%.

Dalam situasi semacam itu, di antara tantangan besar bagi Kabupaten Banyuwangi di dalam meningkatkan kemakmuran rakyat adalah menekan angka kemiskinan dan pengangguran secara terus menerus.

7) Revitalisasi Sektor Pertanian, Pariwisata, dan UMKM

Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar bagi PDRB di Kabupaten Banyuwangi. Dalam lima tahun terakhir ini, rata-rata sumbangan sektor pertanian kepada PDRB menjadi 50%. Di samping sebagai penyumbang terbesar pada PDRB, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam hal penyerapan angkatan kerja. Hal ini terjadi karena sektor industri olahan, tidak cukup berkembang. Sementara itu, sektor jasa yang berkembang lebih cepat namun tidak banyak menyerap angkatan kerja.

Meskipun demikian, sektor pertanian di Kabupaten Banyuwangi menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan. Secara perlahan, terdapat penurunan sumbangan sektor pertanian kepada PDRB. Hal ini tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani yang diantaranya adalah menurunnya kualitas kesuburan tanah, banyaknya hama dan penyakit tanaman, dan perubahan iklim yang tidak menentu. Masalah yang dihadapi nelayan adalah penurunan hasil tangkapan ikan. Di pihak lain, para petani dan nelayan tidak mampu mendayagunakan hasil-hasil produksi supaya memiliki nilai tambah. Sebagian besar, produk yang dihasilkan masih dijual berupa bahan mentah. Produk-produk pertanian itu belum dimanfaatkan secara lebih baik menjadi produk-produk olahan, baik setengah jadi maupun produk jadi.

Tantangan terbesar bagi Kabupaten Banyuwangi adalah melakukan revitalisasi sektor pertanian. Melalui revitalisasi ini, produksi sektor pertanian akan meningkat, sehingga sumbangannya pada PDRB juga akan meningkat. Selain itu, revitalisasi juga berkaitan dengan upaya mengkaitkan (linkage) produk-produk pertanian dengan produk-produk industri olahan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan para petani dan nelayan. Pada akhirnya, kesejahteraan para petani dan nelayan juga akan mengalami peningkatan.

b. Strategi Berdasarkan Kekuatan

Sektor Pariwisata yang semakin berkembang, sektor jasa yang memiliki potensi dalam peningkatan sumbangan terhadap PDRB adalah sektor pariwisata yang terkait dengan industri pariwisata, seperti perhotelan, restoran, dan industri kerajinan. Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi wisata alam yang cukup besar. Potensi ini bisa berkembang apabila dikaitkan dengan posisi Banyuwangi yang strategis sebagai pintu masuk ke Bali melalui perjalanan darat. Apabila potensi wisata itu bisa dikembangkan secara baik, maka industri lainnya juga akan berkembang dengan baik.

1) Industri Kecil Menengah yang berkembang

Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan taraf hidup sebagian besar masyarakat khususnya menengah kebawah. Pemberdayaan koperasi dan UMKM dipilah menjadi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), pemberdayaan usaha mikro, dan penguatan kelembagaan koperasi. Pemberdayaan mengemban misi membentuk koperasi dan UMKM yang berdaya saing.

UMKM telah membuktikan ketahanannya terhadap krisis. Resesi ekonomi pada 2008-2009 di berbagai belahan dunia berimbas pula ke Indonesia. Terdapat pengaruh bagi kondisi perekonomian Banyuwangi meskipun tidak signifikan. Hal ini disebabkan kondisi perekonomian di Kabupaten Banyuwangi lebih banyak ditopang oleh sektor riil. Krisis ekonomi yang terjadi tidak memberikan pengaruh langsung bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi.

Upaya pengembangan UMKM kedepan diarahkan untuk menjadikan para pelaku ekonomi (UMKM) lebih kuat dengan memiliki kemampuan usaha yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan berdaya saing. Adapun untuk mewujudkan misi pemerataan pembangunan dan berkeadilan, upaya pemberdayaan diarahkan kepada usaha skala mikro dan kecil, yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah, khususnya, para pelaku ekonomi di kelompok usaha ini. Sementara itu, dalam penguatan kelembagaan perkoperasian, upaya pengembangan diarahkan agar dapat meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif anggotanya, terutama untuk usaha mikro dan kecil yang berkoperasi.

Peningkatan kompetensi melalui perkuatan kewirausahaan dan produktivitas. Adapun untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, akan ditempuh kebijakan meningkatkan kapasitas usaha dan keterampilan pengelola usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha.

2) Lingkungan Alam

Suatu pembangunan akan bermakna lebih baik apabila berkelanjutan (sustainability). Di antara faktor penting bagi keberlanjutan pembangunan berkaitan dengan lingkungan. Masalah lingkungan di Kabupaten Banyuwangi menjadi isu yang sangat penting karena kegiatan ekonomi masyarakat sebagian besar berkaitan dengan

pemanfaatan sumber-sumber alam. Sektor yang berkaitan dengan pertanian, seperti perkebunan, pertambangan, dan perikanan, masih sangat tergantung pada masalah lingkungan. Apabila kualitas lingkungan mengalami penurunan, kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam juga akan mengalami penurunan.

Faktor lingkungan juga terkait dengan kepentingan ekologi, seperti ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati dan mempengaruhi perubahan cuaca. Apabila daya dukung lingkungan mengalami penurunan, seperti menurunnya sumber mata air untuk kepentingan air bersih dan irigasi, maka keseimbangan ekosistem dan kualitas udara juga mengalami penurunan. Tantangan besar bagi Kabupaten Banyuwangi adalah menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya untuk kepentingan sesaat dan jangka pendek, melainkan untuk kelangsungan alam itu sendiri dan kelangsungan pemanfaatannya oleh generasi berikutnya.

3) Strategi Penyerapan Tenaga Kerja

Ekonomi Kabupaten Banyuwangi tumbuh dengan baik pada taraf sekitar 7%. Namun sayangnya pertumbuhan ekonomi yang ada tidak disertai dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan (jobless growth). Dengan kata lain manfaat dari pertumbuhan ekonomi ternyata belum banyak berdampak pada penciptaan pekerjaan yang baik dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Hal ini menyebabkan berkurang elastisitas penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi.

Meskipun investasi sudah cukup kondusif di Kabupaten Banyuwangi, namun perlu diperluas dan dikembangkan investasi-investasi yang lebih berorientasi padat karya terutama pada sektor formal. Selain bertujuan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja terutama di sektor formal, ini juga mengurangi kebutuhan kesempatan kerja bagi penganggur terdidik yang banyak mengharapkan pekerjaan di sektor formal. Hubungan yang harmonis antara dunia pendidikan dan dunia usaha juga tetap harus dipertahankan untuk menjaga link and match antar dua pihak tersebut.

Sektor informal telah diyakini dapat berfungsi sebagai katub pengaman ketika perekonomian mengalami kelesuan atau sebagai tempat penampungan ketika terjadi perpindahan tenaga kerja yang besar dari sektor tradisional di pedesaan ke sektor yang lebih modern di perkotaan dimana tidak dapat tertampung semuanya di sektor formal. Namun sayangnya, selama ini keberadaan sektor informal terutama di daerah perkotaan justru banyak disinyalir menimbulkan masalah. Kehadiran sektor informal di perkotaan banyak dianggap bertentangan dengan semangat daerah perkotaan yang menghendaki adanya ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan keindahan (Yustika, 2000). Di sisi lain pemerintah di daerah perkotaan biasanya lebih menyambut baik investasi terhadap usaha-usaha besar dan formal yang padat modal dan sudah barang tentu juga akan memberikan pendapatan yang lebih kepada pemerintah kota dibandingkan mendorong berkembangnya sektor informal.

Meskipun demikian, pendapat positif dari Todaro (1997) mengatakan bahwa keberadaan sektor informal di daerah perkotaan ini justru sangat berkaitan dengan sektor formal perkotaan (industri). Sektor formal membutuhkan sektor informal paling tidak dalam hal menyediakan input yang murah dan harga barang termasuk barang-barang kebutuhan pokok bagi para pekerjanya pada tingkat harga yang relatif rendah, terutama bagi para pekerja sektor formal yang memiliki pendapatan menengah ke bawah. Disisi yang lain sektor informal juga membutuhkan pertumbuhan dari sektor

formal sebagai penghasil dari barang dan jasa yang mereka tawarkan. Bagaimanapun juga tidak bisa dipungkiri bahwa sektor informal telah ikut serta meramaikan dinamika kehidupan masyarakat terutama di daerah perkotaan. Di kota-kota besar misalnya banyak kita jumpai pegawai pegawai sektor formal pada jam makan siang mencari makan di warung-warung sektor informal di sekitar tempatnya bekerja karena menyediakan makanan yang relatif murah. Demikian juga sektor informal membutuhkan pelanggan sektor formal untuk dapat memenuhi kebutuhannya, menggambarkan interaksi yang baik antara sektor formal dan sektor informal.

Dengan angkatan kerja yang unik dan tersegmentasi (sektor formal dan sektor informal) seperti di Kabupaten Banyuwangi ini, maka pembuat kebijakan atau pemerintah perlu dapat melindungi keduanya. Di satu sisi, perlu adanya terus peningkatan kesempatan kerja di sektor formal (dan sektor non-pertanian) karena terbukti sektor formal banyak memberikan jaminan pekerjaan yang lebih baik. Tetapi disisi yang lain, pemerintah juga tetap harus melindungi sektor informal yang rentan dan tanpa jaminan penghasilan yang stabil. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pengambil kebijakan di Kabupaten Banyuwangi dalam melindungi posisi sektor informal sebagai berikut:

1. meningkatkan akses kredit bagi pengusaha mikro dan usaha kecil menengah (UKM), serta mengurangi hambatan birokrasi kelompok ini dalam merangsang penciptaan lapangan pekerjaan. Kebanyakan UKM memang tergolong sebagai sektor informal.
2. membuka akses informasi sehingga pekerja sektor informal dapat mencari pekerjaan yang lebih baik dan membuat sebuah strategi kebijakan yang dapat menghubungkan pekerja sektor informal dengan calon pemberi kerja.
3. mengembangkan pelatihan dan pengembangan sektor informal serta pemberian sistem tunjangan kesehatan dan sistem pensiun yang dapat dirancang untuk mendukung dan melindungi sektor informal.
4. Selain kebijakan-kebijakan yang bersifat intervensi langsung seperti diatas, tugas pemerintah adalah menjamin penciptaan lingkungan usaha yang kondusif bagi perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi di sektor informal dan dapat berdampingan dengan sektor formal.

Apabila kita melihat kembali definisi BPS tentang sektor informal, maka termasuk juga karyawan atau pekerja lepas atau tidak tetap. Berbagai reformasi kebijakan saat ini yang didorong oleh banyak serikat pekerja ternyata kebanyakan berfokus pada perbaikan kesejahteraan pekerja tetap melalui pemberian jaminan dan upah minimum. Pekerja atau karyawan tetap juga lebih berpeluang untuk memperoleh berbagai macam tunjangan seperti uang pesangon dan pensiun. Untuk itulah pembuat kebijakan juga harus dapat menyeimbangkan antara kepentingan pekerja tetap yang jumlahnya sebenarnya hanya sedikit dengan sebagian besar pekerja yang tidak mampu bersuara banyak untuk mempengaruhi kebijakan dan peraturan ketenagakerjaan. Para pekerja ini juga rata-rata berpenghasilan lebih rendah daripada pekerja tetap di sektor formal dan tidak mendapatkan tunjangan non-upah yang lazim diperoleh jika memiliki kontrak.

Memang tidak dipungkiri bahwa strategi pembangunan lebih banyak ditujukan bagi pengembangan sektor formal, atau dengan kata lain sektor informal lebih banyak dilupakan. Alasan ekonomis menjadi alasan utama. Barang dan jasa sektor informal kebanyakan tidak didistribusikan melalui pasar, tidak tercatat dalam Produk Domestik

Regional Bruto, dan memiliki nilai tambah (value added) yang relatif kecil. Sangat berbeda sekali dengan sektor formal yang padat modal dengan nilai tambah yang jauh lebih besar. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa sektor formal lebih terlihat dilindungi oleh pengambil kebijakan.

Namun tentunya tidak bijaksana apabila kemudian pemerintah mengabaikan kepentingan sektor informal mengingat sektor informal merupakan tempat bergantung pekerja yang rata-rata kondisi sosial ekonominya lemah. Untuk itulah salah satu usaha pemerintah dengan membentuk kementerian usaha kecil dan menengah yang bertugas meningkatkan kepedulian sektor informal yang sebagian besar adalah merupakan usaha kecil dan menengah. Dengan segala keterbatasannya dan minimnya bantuan pemerintah terbukti bahwa sektor informal dapat menjadi sub kegiatan perekonomian yang kuat dan tahan banting bahkan dapat menjadi katub pengaman ketika sektor modern atau formal terpuruk.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian maka hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Perkembangan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi dilihat dari pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa Semua sektor di Kabupaten Banyuwangi bersifat positif berarti semua sektor memiliki keunggulan kompetitif dalam memajukan perekonomian di Kabupaten Banyuwangi. Semua sektor yang bertanda positif adalah sektor dengan pertumbuhannya cepat sehingga berpotensi untuk dikembangkan dalam memacu pertumbuhan PDRB. Sektor yang memiliki pertumbuhan paling cepat adalah sektor pertanian, perdagangan dan jasa lebih cepat dibandingkan yang lain. Meskipun sektor lain juga potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Banyuwangi
2. Strategi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi antara lain:
 1. APBD harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara lebih efisien dan efektif serta responsif terhadap kebutuhan dan potensi wilayah Kabupaten Banyuwangi. Harapan besar tersebut bisa dilaksanakan, jika perencanaan anggaran belanja setiap kegiatan pada APBD efisien, tepat sasaran, wajar, tidak underfinancing (kurang) atau overfinancing (berlebih).
 2. Mengurangi kesenjangan infrastruktur baik di tingkat Kabupaten maupun antarkecamatan sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.
 3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing yang lebih baik. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai jika para pekerja tersebut dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, kemampuan untuk bekerja (employable) dan disiapkan untuk menghadapi persaingan global dalam pasar kerja.
 4. Peningkatan kualitas pendidikan dengan perbaikan sarana prasarana dan pelayanan pendidikan secara menyeluruh baik untuk pendidikan formal, maupun pendidikan informal dan non formal, revitalisasi ini, produksi sektor pertanian akan meningkat, sehingga sumbangannya pada PDRB juga akan meningkat

5.2 Saran

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pemerintah Daerah hendaknya memprioritaskan pengembangan sektor yang menjadi basis serta mempunyai pertumbuhan cepat dan berdaya saing, yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, bangunan, keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan.
2. Program kebijakan yang dibuat hendaknya tidak hanya memperhatikan sektor yang sudah unggul saja melainkan perlu memberi perhatian terhadap sektor yang masih nonbasis sehingga dapat meningkat dan dapat mencukupi kebutuhan, baik itu di dalam maupun di luar Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahl, Roy. W. 1999. *Implementation* Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. STIE YKPN Yogyakarta
- Aziz, Iwan Jaya. 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: LPFE-Universitas Terbuka.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Ed. 4, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Meier, G. M. 2005. *Leading Issues in Economic Development*. Oxford University Press. New York.
- Ranis, Gustav and Stewart, Frances, 2002. *Economic Growth and Human Development in Latin America*. Cepal No. 78. The UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). Diakses dari:
- Sianipar, Herlina Hotmadinar. 2012. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Tingkat Kemiskinan Di Propinsi Sumatera Utara*. Tesis. USU
- Hasibuan, N. 2000. *Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli dan Regulasi*. LP3ES, Jakarta.
- Spillane, J. 1993. *Ekonomi Regional Modul 1-9*. Jakarta: Penerbit Karunia Jakarta Universitas Terbuka.
- Sutikno, 2013. *Analisis Peran Sektor Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Jawa Timur)*. Tesis Universitas Diponegoro.

